

MENINGKATKAN INVESTASI DAN DAYA SAING PRODUK UNGGULAN

Oleh : Marsuki

Disampaikan dalam Seminar Investasi oleh “LEKPIS”,
Dengan Tema : *Peran Pemerintah Meningkatkan Investasi dan Daya
Saing Produk Unggulan Daerah.*

Batam, 3 September 2007.

MENINGKATKAN INVESTASI DAN DAYA SAING PRODUK UNGGULAN¹

Oleh : Marsuki²

Sudah diketahui bahwa investasi adalah kegiatan ekonomi utama yang dapat menjadi *prime mover* pembangunan ekonomi suatu wilayah, melalui dampaknya yang luas terhadap berbagai upaya perbaikan tatanan kegiatan ekonomi masyarakatnya. Dengan investasi akan terjadi penyerapan tenaga kerja yang cukup besar, akan meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut secara berkelanjutan. Oleh karena itu hampir semua pemerintah diberbagai tingkatan, selalu berusaha mencari cara untuk mendorong kegiatan investasi di wilayahnya masing-masing. Tapi dalam prakteknya, tentu saja hal itu bukanlah sesuatu yang mudah direalisasikan.

Sejatinya, era globalisasi dan otonomi daerah (Otonomi Daerah) adalah wadah atau instrumen yang dapat dijadikan pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong dan menarik minat para investor baik lokal, nasional maupun global untuk berinvestasi di wilayah mereka masing-masing. Hanya masalahnya, strategi apa yang perlu dan dapat dilakukan agar kegiatan investasi tersebut dapat terlaksana dan dapat memberi manfaat untuk kepentingan rakyat kebanyakan, dalam hal penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan dan konsumsi serta peningkatan kesejahteraan hidup mereka secara adil dan berkelanjutan.

Untuk mencapai hal tersebut, jelas diperlukan pemikiran dan tindakan yang terencana baik, karena jika tidak, justru masalah baru yang akan terjadi bagi rakyat kebanyakan khususnya, seperti dapat dicatat dari beberapa pengalaman buruk dan mengkhawatirkan yang telah terjadi. Hal itu mungkin disebabkan, karena Pemda kurang menyadari begitu pentingnya investasi sebagai fokus kebijakan ekonomi guna memberdayakan perekonomian rakyat, misalnya dengan secara tiba-tiba berusaha menjadikan daerahnya sebagai bagian dari proses bisnis global yang rimba dan perilakunya belum diketahui. Sehingga ada Pemda, bukan memasarkan daerahnya untuk menarik investor, tetapi justru menjual daerahnya, dengan memberi konsesi kepada investor asing misalnya terhadap asset rakyatnya. Bahkan ada juga dengan cara melego perusahaan daerahnya selama 25 tahun, sehingga Pemda justru hanya

¹ Disampaikan dalam Seminar Investasi oleh "LEKPIS" dengan Tema : Peran Pemerintah Meningkatkan Investasi dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah. Batam, 3 September 2007.

² Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI)

menambah hutang baru ke investor yang membeli BUMD-nya. Ironisnya, dalam kondisi keterbatasan keuangan pemerintah, ada banyak kasus dengan alasan promosi investasi, justru melakukan pemborosan karena kenyataannya digunakan untuk jalan-jalan para pejabatnya.

Sehingga jika benar-benar pemerintah berfikir untuk menjadikan investasi sebagai alat untuk mensejahterakan rakyatnya, maka seharusnya berbagai kejadian tersebut tidak akan dipraktekkan lagi, justru harus berusaha membangun paradigma baru iklim berinvestasi, terutama dengan cara memahami dengan benar investasi apa yang dibutuhkan serta merencanakan pelaksanaan investasi tersebut, sesuai dengan kondisi sumber daya ekonomi atau sektor ekonomi potensial mereka, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungannya.

Secara umum investasi diartikan sebagai setiap usaha untuk mendayagunakan sumberdaya ekonomi yang ada pada suatu saat untuk memperoleh manfaat di suatu masa yang akan datang. Dalam arti luas, investasi meliputi investasi bisnis yang dilakukan pihak swasta dengan tujuan memperoleh "keuntungan" dan investasi non bisnis yang umumnya dilakukan pemerintah untuk memperoleh "kemanfaatan". Meskipun dalam kenyataannya kedua definisi tersebut sulit dibedakan, tapi umumnya yang diperhitungkan hanyalah dalam pengertian investasi bisnis di sektor riil dan jasa.

Pada dasarnya, investasi riil terdiri dari : Investasi untuk melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam, meliputi pertambangan, agro industri, perikanan, peternakan dan pariwisata alam; Investasi untuk melakukan proses produksi yang menghasilkan produk olahan di suatu daerah kemudian dipasarkan di daerah lainnya; kemudian Investasi property dan infrastruktur; Investasi di bidang industri berbasis pengetahuan; Investasi di bidang industri pendukung; dan Investasi di bidang restoran dan hiburan. Sedangkan investasi di bidang jasa, meliputi : Investasi di bidang jasa keuangan; Investasi di bidang perdagangan; Investasi yang terfokus di bidang perdagangan dan pemasaran; serta Investasi jasa konsultan. Selain itu ada jenis investasi yang bersifat spesifik, yaitu investasi yang ditujukan untuk mengambil alih kepemilikan suatu usaha, tanpa tertarik untuk mengganti pengelolaannya, kecuali fungsi pengendalian dan keuangan, dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan, memperluas jaringan pemasaran, jaringan produksi, jaringan pengadaan dan penguasaan bisnis tertentu.

Di Indonesia berbagai jenis investasi tersebut telah ada, dan umumnya perilaku pelakunya juga telah diketahui arah investasinya. Misalnya, investor asing umumnya lebih berminat untuk investasi SDA yang bersifat eksplotatif, sedangkan investor nasional umumnya berminat di investasi bidang produksi, kemudian investor lokal lebih tertarik di investasi perdagangan.

Diamond dan *Michael Porter* menjelaskan bahwa para investor dalam melakukan investasinya, utamanya investasi yang bersifat jangka panjang (investasi SDA dan produksi) selalu mendasarkan keputusannya pada lima indikator makro. Meliputi : pertimbangan aspek tingkat persaingan bisnis di kawasan operasi mereka; kemudian ada tidaknya bahan baku; ada tidaknya pembeli; ada tidaknya produk substitusi; dan aspek ada tidaknya ancaman dari pemain baru. Sedangkan pertimbangan mikronya didasarkan pada: ketersediaan informasi tentang peluang investasi; hasil analisis awal rencana investasi, dalam hal tingkat pengembalian dan waktu pengembalian; hasil analisis lanjutan rencana investasi, dalam hal keterkaitan dengan bisnis inti dan nilai tambah bagi pemilik; kemudian hasil analisis final rencana investasi, dengan memperhatikan hambatan-hambatan sosial dan politik; baru akhirnya memutuskan melakukan atau tidak melakukan investasi, dengan pertimbangan apakah melakukan investasi secara keseluruhan, secara bertahap, atau tidak sama sekali.

Yang perlu diketahui bahwa investasi dilakukan para investor pada dasarnya didasarkan pada tujuan memperoleh "*laba*", jadi bukan "*idealisme*". Sehingga jika mengharapkan bahwa investasi akan dapat memberi manfaat besar bagi rakyat kebanyakan, maka pemerintah benar-benar perlu mempersiapkan cara dan strategi yang terbaik demi kepentingan para pihak, baik untuk investor, pemerintah dan terutama rakyat. Dalam hal ini berarti pemerintah perlu menjadi pelaku utama yang mengetahui sejak dini mengenai tujuan dan manfaat dari peluang investasi yang akan diberikan, siapa target investor dan perlu memahami cara berfikir dan itikad para investor-investor tersebut.

Di Indonesia, sejak era Otonomi, sebenarnya telah ada lembaga khusus yang dimaksudkan untuk mendorong dan mengembangkan daya saing terutama investasi di daerah, yaitu Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). KPPOD beranggapan bahwa "iklim investasi" akan menentukan daya saing daerah, dimana itu merupakan penentu utama daya tarik investasi dari suatu daerah. Dalam kaitan ini KPPOD mengemukakan bahwa ada lima variabel penentunya, yakni : variabel kelembagaan, meliputi kepastian hukum, faktor aparatur, kebijakan daerah, dan aspek kepemimpinan lokal. Kemudian variabel keamanan, politik dan sosial budaya; selanjutnya variabel ekonomi daerah, meliputi aspek pendapatan per kapita dan struktur ekonomi; juga variabel tenaga kerja; serta variabel infrastruktur.

Sedangkan Bank Indonesia (BI), mengemukakan 9 indikator penentu daya saing daerah dalam kaitannya dengan daya tarik investasi di daerah. Meliputi : aspek perekonomian daerah; keterbukaan; sistem keuangan; infrastruktur; iptek; SDM; kelembagaan; *Governance* dan kebijakan; serta aspek manajemen dan ekonomi mikro.

Berdasarkan indikator-indikator penentu daya saing investasi di daerah versi KPPOD dan BI tersebut, selanjutnya dapatlah ditetapkan 9 faktor penentu penting bagi keputusan

berinvestasi di daerah selama ini di Indonesia yang perlu mendapat perhatian pemerintah di berbagai tingkatan khususnya, yaitu : aspek perizinan; perpajakan, keamanan; pasar atau daya beli; ketersediaan SDA dan SDM; ketersediaan infrastruktur; mitra bisnis dan tersedianya produk yang akan dibeli.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor penentu investasi tersebut di atas, berarti pemerintah di berbagai tingkatan, seharusnya sudah dapat menetapkan strategi untuk membangun iklim investasi yang terbaik di wilayahnya masing-masing. Berikut ini dikemukakan beberapa pemikiran konstruktif yang dapat dijadikan referensi bagi para pelaku untuk mencapai tujuan tersebut.

Pertama, pemerintah perlu menyiapkan konsep yang jelas dan dapat dimengerti masyarakat mengenai program untuk meningkatkan investasi. Mekanismenya, menyampaikan dan menerangkan ke publik arah kebijakan pembangunan ekonomi pemerintah sesuai dengan kondisi sumber daya ekonomi yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah perlu menempuh beberapa kebijakan mendasar, seperti membangun pemerintah yang bersih dan transparan, membangun pelayanan birokrasi yang efisien dan profesional, serta membangun kesadaran masyarakat untuk terbuka menerima investasi. Kemudian, pemerintah mampu menjadi penyelia, maupun fasilitator bagi para stake holder investasi dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi para investor, di bidang produksi, penyanggah, pembiayaan dan pemasaran (Gerbang Emas di Sul-Sel)

Kedua, melakukan pemetaan dan inventarisasi mengenai potensi ekonomi yang ada, meliputi aspek sumber daya, produk, pelaku, manusia dan pasar. Tujuannya, untuk mengetahui bagaimana peta ekonomi dan bisnis secara kewilayahan, sebagai bahan untuk melakukan pemetaan ruang pengembangan investasi yang akan dilakukan.

Ketiga, menyusun prioritas pengembangan ekonomi daerah, dengan memfokuskan prioritas pembangunan daerah yang dapat menarik minat investor. Hal ini didasarkan pada tiga pertimbangan, yakni sektor dimana masyarakat sebagai pelaku utamanya, terdapat sumberdaya alam yang melimpah, serta sektor dimana daerah mempunyai keunggulan khusus baik secara komparatif, kompetitif dan distingtif (Agropolitan di Gorontalo)

Keempat, melakukan pendekatan klaster, yang berarti bahwa di daerah dilakukan pengarahannya kawasan tertentu untuk industri tertentu, atau mengembangkan bisnis yang berbeda dengan daerah lainnya, namun saling berkaitan atau membutuhkan, seperti yang disarankan oleh *Michael Porter*, dimana konsep tersebut sudah dipraktekkan di beberapa negara maju, seperti Italia, Perancis dan Jerman, bahkan di beberapa daerah Indonesia sendiri, misalnya kasus Barlingmascekap di Jateng.

Kelima, setelah menetapkan *road map* investasi seperti tersebut di atas, maka selanjutnya ditetapkan target investor yang akan menjadi sasaran untuk diajak dan di promosi sesuai dengan kemampuannya. Untuk itu perlu kejelasan siapa, dimana, dan kapan melakukan promosi. Manfaatnya, untuk menemukan investor yang benar-benar bersedia berinvestasi berdasarkan pertimbangan bisnis dan manfaatnya bagi pembangunan ekonomi rakyat.

Keenam, dapat diukurinya kinerja pemerintah dalam mengembangkan iklim investasi, yang akuntabilitasnya dapat dinilai dari : ada tidaknya investasi yang masuk, sesuai tidaknya dengan fokus program investasi yang ditetapkan, serta ada tidaknya manfaat yang diperoleh oleh para stake holder, terutama rakyat kebanyakan, terutama dalam kaitannya dengan jumlah penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan dan konsumsinya serta akan terciptanya keadilan ekonomi bagi masyarakat.

Akhirnya, perlu disadari bahwa meskipun penanggungjawab utama untuk meningkatkan investasi dan daya saing di setiap wilayah memang harus diemban oleh pemerintah, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh peran aktif dari stake holder lainnya sesuai peran spesifiknya masing-masing secara proporsional, seperti pengusaha, perbankan dan masyarakat.